

AKSES  TERBUKA

ARTIKEL

Hambatan dan Peluang Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Kawasan Kepulauan: Tinjauan Literatur Kritis

Diterima

15 Maret 2024

Disetujui

7 Juni 2024

Diterbitkan

Juni 2024

DOI

Challenges and Opportunities for Inclusive and Sustainable Economic Development in Island Regions: A Critical Literature Review

Fatimatuz Zahrah¹, Sri Rahayu²

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung¹

✉ fatimatuazzahrah86@gmail.com¹

☎ 082337115020¹

Abstrak: Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan untuk menguatkan perekonomian suatu daerah dengan memaksimalkan potensi dan tetap memperhatikan keberlangsungan kehidupan jangka panjang. Usaha yang sama dilakukan di kawasan kepulauan untuk memaksimalkan kekayaan daerahnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, hambatan, dan peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur kritis dengan melakukan review pada 33 artikel dari tahun 2017 sampai dengan 2024, dan fokus pada kemajuan riset tentang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan dengan koordinasi yang baik dan terarah antara pemerintah dan masyarakat, desain pembangunan *green economy* dan *blue economy*, peningkatan infrastruktur dan menjaga kualitas sumber daya alam kawasan kepulauan. Hambatan yang dialami berupa kesiapan dan kualitas masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, dan aturan dan implementasi kurang baik. Peluang yang berhasil dianalisis berupa pemanfaatan potensi sumber daya alam, perekonomian berdasarkan *green economy* dan *blue economy*, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan penuh dari pemerintah dan kerja sama yang baik dengan warga masyarakat dan UMKM (kelompok masyarakat kreatif) direkomendasikan untuk menjadi salah satu upaya untuk menyukkseskan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di berbagai kepulauan dan juga disarankan untuk rencana program pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi berkelanjutan; ekonomi inklusif; hambatan; peluang.

Abstrack : *Inclusive and sustainable economic development is carried out to strengthen the economy of a region by maximizing its potential and still paying attention to the long-term sustainability of life. The same efforts are being made in island areas to maximize regional wealth with the aim of increasing the economic welfare of the community. This research aims to analyze the dimensions of inclusive and sustainable economic development, obstacles and opportunities for inclusive and sustainable economic development. This research is a critical literature review by reviewing 33 articles from 2017 to 2024, and focuses on progress research on inclusive and sustainable economic development. The findings, the focus on inclusive and sustainable economic development is carried out with good and direct coordination between the government and the community, designing green economic and blue economic development, improving infrastructure and maintaining the quality of natural resources in the archipelagic region. The obstacles experienced include the readiness and quality of the community, inadequate infrastructure, lack of coordination between the government and the community, as well as poor regulations and implementation. Opportunities that were successfully analyzed were in the form of utilization of natural resource potential, an economy based on green economy and blue economy, collaboration between government and society. Full involvement from the government and good cooperation with community members and MSMEs (creative community groups) is recommended as one of the efforts to encourage inclusive and sustainable economic development in various islands and is also recommended for plans for inclusive and sustainable economic development programs.*

Keywords: *Sustainable economy; inclusive economy; challenges; opportunities.*

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru dalam pembangunan ekonomi. Tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan faktor inklusif dan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam. Usaha untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera salah satunya dilakukan dengan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan (Rany et al., 2020). Ekonomi inklusif merupakan usaha untuk menciptakan masyarakat yang memiliki akses yang sama terhadap ekonomi, mengurangi kesenjangan kelompok-kelompok masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas, 2019) pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga pilar uti:



Gambar 1.

Pilar-pilar indeks pembangunan ekonomi inklusif

Gambar 1 menunjukkan indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Terdapat tiga pilar yang digunakan untuk mengukur ekonomi inklusif baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pilar pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan sub pilar: pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi. Pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan sub pilar: ketimpangan dan kemiskinan. Pilar ketiga yaitu perluasan akses dan kesempatan, dengan sub pilar: kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, dan keuangan inklusif.

Selain membangun ekonomi inklusif, setiap daerah juga perlu memperhatikan pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan proses pelaksanaan kegiatan ekonomi yang fokus pada memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan keberlanjutan kehidupan selanjutnya. Beberapa nilai yang menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu keberlangsungan ekonomi, kelestarian lingkungan, kelestarian sosial dan pembangunan berkelanjutan. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, meningkatkan green economy, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga lingkungan alam merupakan suatu keharusan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan green economy dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan, beberapa menunjukkan dampak nyata. Permana (2018) menyebutkan bahwa pembangunan dengan wawasan lingkungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia dan indeks kualitas lingkungan hidup. Wawasan lingkungan menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Selain wawasan akan lingkungan, infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (Harsono et al., 2024). Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Usaha untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan harus dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kawasan kepulauan. Kawasan kepulauan secara perlahan mulai membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryani et al. (2023) menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki peran penting

dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak baik dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menjadi acuan penting dalam pembangunan ekonomi di kawasan kepulauan, salah satunya dilakukan dengan pengembangan sektor pariwisata. Sari dan De Fretes (2021) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan Kepulauan Seribu dilakukan dengan pengembangan sektor pariwisata yang menerapkan tujuh strategi dalam mengembangkan industri pariwisata sehingga memberikan dampak yang maksimal dalam pembangunan ekonomi. Kawasan kepulauan dapat mengembangkan potensi sumber daya alam sesuai dengan keunggulan yang dimiliki.

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan sangat penting, dan bergantung pada bagaimana pemerintah setempat memperhatikan keunggulan kawasan kepulauan, strategi pengembangan pariwisata, kebijakan pelaksanaan berkaitan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan pengembangan sarana dan prasarana suatu kawasan kepulauan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita et al. (2021) bahwa pariwisata yang kurang menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang baik dan variatif, serta metode pengembangan yang masih bersifat konvensional, strategi pemasaran yang belum optimal menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah setempat, dan kemampuan untuk melihat peluang dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing kepulauan. Dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerintah tidak boleh melakukan hal tersebut secara terburu-buru. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan harus dilakukan dengan konsep yang matang, proses yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang jelas, dan tahapan-tahapan serta kerja sama yang memadai dengan seluruh elemen masyarakat.

Peran pemerintah dalam mewujudkan ekonomi

inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mendesain pembangunan ekonomi dan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah wajib untuk menelaraskan peraturan terkait ekonomi yang selaras dengan pemberdayaan dan perlindungan kekayaan alam (Darajati, 2023). Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) juga memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Tanjung, 2017). Fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan harus memperhatikan beberapa detail dan usaha yang sama yang sudah dilakukan di beberapa daerah kepulauan yang lain.

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan telah banyak dianalisis oleh para ahli dari berbagai perspektif dan fokus penelitian. Beberapa penelitian terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan oleh beberapa daerah kepulauan dengan berbagai cara seperti peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dan perbaikan infrastruktur (Pratama et al., 2023). Selain itu, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan juga dapat dilakukan dengan mendesain secara baik sistem ekonomi seperti penggunaan green economy dan blue economy (Akbar et al., 2022; Mangkurat, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerintah daerah kepulauan sudah melakukan pembangunan dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan analisis, masih terdapat research gap berupa usaha yang dilakukan fokus pada masing-masing bagian, seperti membangun masyarakat, membangun infrastruktur, atau desain ekonomi daerah kepulauan. Diperlukan analisis yang menyeluruh dan berkesinambungan terkait usaha membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di daerah kepulauan.

Penelitian ini kemudian menganalisis dan fokus pada usaha untuk melakukan tinjauan literatur kritis terkait upaya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Urgensi penelitian yaitu memberikan pembahasan yang secara khusus menganalisis berbagai penelitian untuk mengetahui sejauh mana

pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan fokus pembangunan ekonomi inklusif sudah dilakukan. agar menjadi satu kesatuan terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Diperlukan suatu strategi pembangunan yang matang dalam usaha mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan harus ada sinergi antara pemerintah setempat, pihak swasta dan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis secara kritis temuan terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan khususnya terkait hambatan dan peluang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis fokus pembangunan ekonomi inklusif di berbagai daerah kepulauan. Artikel ini akan memudahkan untuk kawasan kepulauan yang lain dalam fokus membangun ekonomi inklusif yang fokus pada potensi dan permasalahan daerah masing-masing. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu bagaimana fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, hambatan dan solusi yang dilakukan yang dihadapi oleh daerah kepulauan untuk membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di daerah kepulauan. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan fokus kajian pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kritis. Metode ini merupakan suatu cara baku yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melakukan proses sintesis terhadap penelitian yang sudah dilakukan dan relevan terkait satu tema studi tertentu (Petticrew & Roberts, 2006). Pada penelitian ini, tema yang dianalisis yaitu tentang “pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tinjauan literatur kritis digunakan sebagai metode penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data secara jelas dan konkrit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan riset dengan tema pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan berbagai artikel yang terbit pada tahun 2017 sampai dengan 2024. Artikel diakses melalui berbagai sumber seperti Google Scholars, ResearchGate, Buku, jurnal, dan artikel lain yang

relevan, serta dikumpulkan dari situs resmi pemerintah di bidang administrasi publik (Miles et al., 2018). Istilah yang digunakan untuk menelusuri artikel ilmiah yaitu “pembangunan ekonomi”, “ekonomi inklusif”, “ekonomi berkelanjutan”, “pembangunan ekonomi berkelanjutan”, “ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Selama proses analisis dokumen, artikel yang berisi kata kunci tersebut diunduh dan ditinjau satu persatu oleh peneliti. Sembilan puluh enam artikel ditemukan dalam proses pencarian dokumen (n= 96). Berdasarkan tinjauan, beberapa artikel dihapus dari penelitian: 1. penelitian duplikat (n= 29); 2. Artikel dari prosiding, buku, dan bab buku (n= 19); 3. Artikel tidak berhubungan dengan pembangunan ekonomi inklusif (n= 15). Tiga puluh tiga artikel yang berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dianalisis secara menyeluruh. Istilah yang digunakan adalah ‘pembangunan ekonomi inklusif’. Selama tinjauan dokumen, artikel yang berisi kata kunci tersebut di atas diunduh dan ditinjau temuan penelitiannya satu per satu oleh peneliti. Tiga puluh tiga artikel yang berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ditinjau secara menyeluruh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan temuan-temuan penting yang memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan dilakukan dengan fokus yang berbeda, memiliki hambatan dan solusi, serta peluang-peluang yang dihadapi. Hasil penelitian dibahas secara lengkap dan memberikan analisis baru dalam kajian pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

A. Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Kawasan Kepulauan

Pembahasan pertama menyajikan hasil analisis terkait fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan. Berdasarkan hasil tinjauan literatur kritis dari berbagai artikel yang

sudah dikumpulkan, fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan dengan koordinasi yang baik dan terarah antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Desain pembangunan *green economy* dan *blue economy* menempati posisi kedua yang banyak dikaji pada fokus pembangunan ekonomi inklusif di kawasan kepulauan. Kemudian diikuti oleh peningkatan infrastruktur dan menjaga kualitas Sumber Daya Alam kawasan kepulauan. Dalam 12 artikel ini, secara implisit atau eksplisit disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan sebagai fokus utama dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan (Tabel 1). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa 11 artikel fokus pada pembangunan desain *green economy* dan *blue economy*. Kemudian fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur dan menjaga Sumber Daya Alam yang memiliki 10 artikel yang membahas terkait hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa fokus dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan memiliki tiga komponen utama (diagram 1).

Tabel 1.

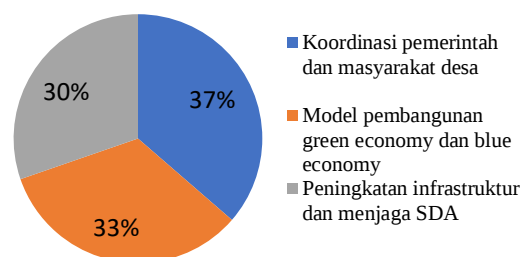
Fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan wilayah kepulauan

No.	Fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Artikel	Studi
1	Koordinasi pemerintah dan masyarakat desa	12	(Azizah & Amaliah, 2023; Darajati, 2023; Karjoko et al., 2020; Niaz, 2022; Nong et al., 2020; Novita et al., 2021; Nusantara et al., 2023; Prasetyasari et al., 2023; Sahdan & Sardju, 2024; Sinabutar et al., 2024; Tini et al.,

			2023; Wondirad et al., 2021)
2	Model pembangunan <i>green economy</i> dan <i>blue economy</i>	11	(Calero & Turner, 2020; Deliabdila et al., 2021; Faradis & Suwandana, 2023; Ilma & Supriadi, 2022; Le et al., 2021; Li et al., 2021; Nurjannah & Mokodompit, 2023; Phelan et al., 2020; Syafira, 2023; Wijayanti, 2022; Wu et al., 2020)
3	Peningkatan infrastruktur dan menjaga SDA	10	(Akbar et al., 2022; Arieta et al., 2023; Fei et al., 2021; Lovina, 2023; Mangkurat, 2023; Nesticò & Maselli, 2019; Nusantara et al., 2023; Pratama et al., 2023; Sinabutar et al., 2024; Su et al., 2021)

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024.

Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Kawasan Kepulauan

**Diagram 1.**

Fokus Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel 1 dan diagram 1, dapat dijelaskan bahwa fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan terdiri dari tiga hal.

Pertama, Koordinasi pemerintah dan masyarakat desa. Koordinasi antara pemerintah yang dimaksudkan yaitu bagaimana pemerintah mampu menghadirkan peraturan yang terarah dan terimplementasi dengan baik, serta melibatkan stakeholder dan masyarakat. Beberapa aturan yang dibuat oleh daerah berkaitan dengan *green economy* belum berfungsi secara maksimal, selain itu masyarakat kurang berkontribusi dalam usaha membangun wilayah (Karjoko et al., 2020). Hal ini memberikan gambaran bahwa fokus pembangunan ekonomi inklusif harus melibatkan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Pratama et al. (2023) bahwa beberapa faktor seperti pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi inklusif. Koordinasi pemerintah dan masyarakat tidak hanya sebatas ketika pelaksanaan pembangunan ekonomi saja, tetapi secara keseluruhan prosesnya melibatkan masyarakat. Pengembangan kompetensi masyarakat, pemberian informasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat menjadi hal yang penting dalam proses pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat mampu memberikan hasil yang maksimal untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan seperti yang diharapkan.

Masyarakat memiliki andil yang besar dalam pembangunan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan implementasi nyata yang dilakukan masyarakat dan swasta, serta keterlibatan semua pihak. Pengembangan potensi UMKM dan ekowisata berbasis masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Azizah dan Amaliah (2023) menyebutkan bahwa pembiayaan UMKM memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan pengembangan potensi UMKM berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi

inklusif. Dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, maka dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, mampu membuka peluang dan lapangan pekerjaan, perkembangan investasi, dan menambah angka pendapatan masyarakat. Setiap pemerintah kepulauan harus mampu untuk memaksimalkan potensi daerah kepulauan, dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, Model pembangunan *green economy* dan *blue economy*. Berdasarkan analisis pada artikel, hal ini dapat berupa cara kerja ekosistem yang menggunakan *logic of ecosystem*, prinsip pelestarian lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial, prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan kelautan yang berkelanjutan, menyelaraskan dan mengutuhkannya tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan. Mangkurat (2023) menyebutkan bahwa Potensi laut yang besar harus dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana, sehingga dapat dimanfaatkan dengan membangun wilayah pesisir dan laut secara optimal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, dan meningkatkan barang dan jasa, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa konsep *green economy* memiliki prinsip pelestarian lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial, prinsip pembangunan berkelanjutan (Syafira, 2023). Prinsip-prinsip ini kemudian sesuai dengan fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan. Fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan harus memperhatikan masyarakat sekitar. Model pembangunan *green economy* dan *blue economy* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat (Wijayanti, 2022). Analisis yang dapat dilakukan yaitu, daerah kepulauan harus dapat mendesain pembangunan ekonomi yang bermanfaat untuk keseluruhan masyarakat. Fokus pembangunan ekonomi dengan mendesain *blue economy* dan *green economy* dapat menjadi salah satu alternatif

pembangunan bagi daerah kepulauan yang lainnya.

Ketiga, peningkatan infrastruktur dan menjaga kualitas Sumber Daya Alam. Hal ini berkaitan dengan melengkapi berbagai infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi, melestarikan dan menjaga sumber daya alam baik di sekitar pesisir pantai dan laut. Nusantara et al. (2023) menyebutkan pengelolaan daerah pesisir yang baik memiliki peluang pembangunan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Penelitian lain menyebutkan bahwa peningkatan dan penguatan produk olahan hasil perikanan khas daerah juga perlu peningkatan untuk memberikan hasil yang maksimal (Talib, 2018). Hal ini memberikan analisis bahwa peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya alam menjadi fokus yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Phelan et al. (2020) menyebutkan bahwa ekowisata berbasis komunitas memberikan peluang bagi terciptanya sistem pelestarian warisan alam dan budaya dan meningkatkan perekonomian lokal. Dengan upaya ini, maka akan menambah pemanfaatan alam dan tetap menjaga keberlanjutan. Tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

B. Hambatan dan Solusi Pembangunan Ekonomi Daerah Kepulauan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kajian dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam usaha pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan, tidak secara langsung berjalan mulus dan lancar, beberapa hambatan dialami oleh pemerintah kota dan masyarakat. Hambatan pertama, masyarakat yang belum siap untuk mengelola daerah kepulauan menjadi tempat pengembangan parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) (Niaz, 2022). Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. hal ini terbukti memiliki pengaruh positif terhadap

pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Wijayanti, 2022). Selain itu, dengan mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dan terkoneksi, serta membangun daya tarik wisata yang mengoptimalkan daya dukung ekologi pesisir dan mengutamakan nilai, mempromosikan potensi lokal, adat dan budaya masyarakat Melayu (Hidayat, 2021; Sinabutar et al., 2024). Hambatan dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kreativitas masyarakat untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan kekayaan alam yang sudah dimiliki daerahnya. Selain itu, masyarakat juga menambah nilai kekayaan lokal dan potensi budaya serta adat yang ada.

Hambatan kedua, infrastruktur yang belum memadai. Layanan dan fasilitas umum menjadi hal yang penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan ini, maka pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di kawasan kepulauan, seperti infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan telepon seluler, akses internet yang memadai, yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia (Hussain, S., Gul & Ullah, 2023; Juhro & Ridwan, 2021; Pratama et al., 2023; Yuni, 2022). Berdasarkan hasil analisis, fasilitas umum dan sarana prasarana memiliki pengaruh besar terhadap minat seseorang untuk berkunjung. Selain itu, fasilitas umum yang memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan melakukan inovasi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Hambatan ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Kawasan kepulauan tidak dapat dibangun oleh satu pihak, tetapi harus dikelola secara terpadu agar terbangun interaksi yang baik antara pemerintah, dan masyarakat (Akbar et al., 2022; Nusantara et al., 2023). Solusi yang dapat dilakukan yaitu membuat aturan yang

jelas dan melibatkan masyarakat kawasan kepulauan dalam setiap tindakan dan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Darajati, 2023; Sinabutar et al., 2024; Tini et al., 2023). Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan adalah bahwa keterlibatan semua pihak tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

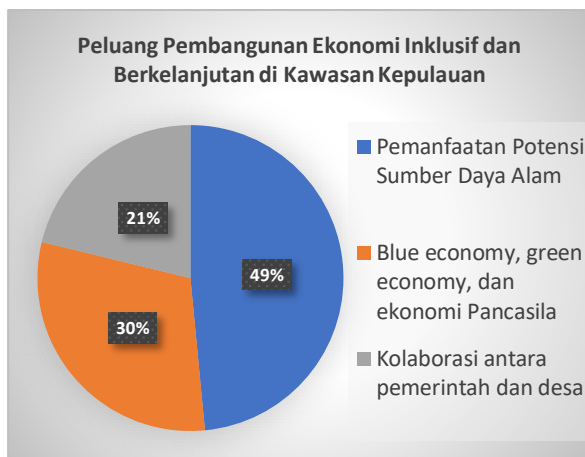
Hambatan keempat, aturan dan implementasi yang kurang baik. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan membutuhkan aturan yang jelas, artinya tidak hanya ada aturannya, tetapi dalam pelaksanaan dan praktiknya tidak ada. Aturan terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan inklusif. Aturan ini sebenarnya sudah memiliki pembahasan terkait pembangunan ekonomi, salah satunya strategi nasional, strategi mencapai target keuangan inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Usaha membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan tidak dapat dilakukan apabila aturan yang bukan sebatas pajangan. Dengan aturan yang jelas dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, maka akan terwujud ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan (Akbar et al., 2022; Karjoko et al., 2020; Nurjannah & Mokodompit, 2023; Tini et al., 2023). Peraturan terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan tidak berhenti sebagai tulisan saja, tetapi dapat diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh lapisan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Akan tetapi, aturan ini belum banyak dipahami oleh pemerintah daerah, pemerintah kawasan kepulauan, dan masyarakat secara umum, sehingga tidak ada sinergitas dalam usaha membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryani et al. (2023) menyebutkan bahwa pengembangan hukum ketenagakerjaan dapat membantu mewujudkan lingkungan kerja yang

harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa Indonesia dapat menjadikan ekonomi kelautan berbasis *blue economy*, dengan salah satu caranya yaitu pemerintah wajib untuk membuat peraturan dan tata kelola baru kelautan nasional yang selaras dengan alam (Darajati, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, aturan yang ada di Indonesia terkait pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan suda ada, tetapi membutuhkan perbaikan dan implementasi yang lebih terstruktur dan jelas.

C. Peluang Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Kawasan Kepulauan

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha membangun ekonomi yang inklusif harus dilakukan secara terstruktur, terencana dengan baik dan matang.

Berdasarkan analisis, pemanfaatan Sumber Daya Alam merupakan peluang terbesar untuk dikembangkan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Mangkurat (2023) menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa sumber daya alam yang besar, merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Peluang pemanfaatan sektor pariwisata merupakan peluang paling besar yang banyak digunakan. Kekayaan alam, kekhasan kawasan kepulauan, dan kuliner yang unik dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Sistem membangun perekonomian daerah kepulauan berdasarkan *green economy*, *blue economy*, dan ekonomi Pancasila juga menjadi perhatian dalam peluang membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hasil analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai daerah kepulauan dijelaskan dalam diagram 2.

**Diagram 2.**

Peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024.

Berdasarkan diagram 2, Penjelasan terkait peluang nyata dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat dibagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, pemanfaatan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan maritim merupakan peluang untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan apabila pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan baik dan terencana sehingga mampu memberikan hasil yang baik dan berkelanjutan. Desain *blue economy* dan *green economy* dapat menjadi salah satu strategi ekonomi kawasan kepulauan. Pembangunan ekonomi kepulauan harus memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan (Mangkurat, 2023; Syafira, 2023; Wijayanti, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya memanfaatkan kekayaan alam dan potensi sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan dan prinsip pelestarian lingkungan.

Kekayaan alam khas daerah kepulauan dapat dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata. Kawasan kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat memikat wisatawan dan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Phelan et al. (2020) bahwa kekayaan sumber daya alam

dapat dikelola menjadi pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemanfaatan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti memanfaatkan potensi masing-masing kawasan kepulauan, ekosistem pesisir, pelestarian warisan alam dan budaya, menjaga ekosistem laut, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Fei et al., 2021; Ilma & Supriadi, 2022; Sinabutar et al., 2024; Wijijayanti et al., 2020). Pemanfaatan sektor pariwisata mampu memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kedua, desain *blue economy* dan *green economy*. memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya alam kawasan kepulauan, tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial, menguatkan dan menata ulang tata kelola laut nasional selaras dengan alam (Darajati, 2023; Deliabilda et al., 2021; Mangkurat, 2023; Syafira, 2023; Wijayanti, 2022). Desain *blue economy* dan *green economy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan baik dan bijaksana, dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah kepulauan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan baik dan bijaksana, mengadakan pelatihan dan peningkatan UMKM, pemberdayaan masyarakat, melakukan promosi pariwisata daerah, bekerjasama dengan stakeholder dan pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dan kekayaan alam kawasan kepulauan (Nong et al., 2020; Novita et al., 2021; Su et al., 2021; Tini et al., 2023). Berdasarkan analisis, sejauh ini pemberdayaan masyarakat dan promosi pariwisata daerah sudah ada. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap

dan pengelolaan infrastruktur yang semakin diperbaiki, menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di daerah kepulauan.

IV. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan sangat penting dilakukan di Indonesia. Penelitian ini fokus pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, hambatan dan solusi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan literatur kritis, hal ini menjadi keterbatasan analisis yang dimiliki artikel ini.

Temuan penelitian ini yaitu fokus pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan dengan koordinasi yang baik dan terarah antara pemerintah dan masyarakat, desain pembangunan *green economy* dan *blue economy*, peningkatan infrastruktur dan menjaga kualitas sumber daya alam kawasan kepulauan. Peluang pembangunan ekonomi berupa pemanfaatan sektor pariwisata, perekonomian berdasarkan *green economy* dan *blue economy*, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan kawasan kepulauan berkaitan dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan harus secara matang dan terintegrasi antara keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Implikasi penelitian memberikan informasi baru terkait berbagai hambatan dan solusi yang dilakukan dan dialami oleh berbagai kawasan kepulauan dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi nyata pada bidang tata kelola pemerintahan yaitu pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan fokus menganalisis kekuatan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah, menyusun strategi yang matang, dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian lebih lanjut terkait peluang pembangunan

ekonomi inklusif di kawasan kepulauan dapat dilakukan. Riset terkait kawasan kepulauan Indonesia harus menjadi kajian yang memberikan dampak pada dunia global. Limitasi penelitian ini yaitu keluasan kajian pustaka dan sumber data, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber dan metode penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D., Pratama, R. A., Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166–177.
- Arieta, S., Niko, N., Rahmawati, N., & Wahyuni, S. (2023). Integrasi Pembangunan Berperspektif Ekofeminisme (Studi Pendahuluan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Perbatasan Kepulauan Riau). *Jurnal Media Sosiologi*, 26(2), 12–24.
- Azizah, A., & Amaliah, I. (2023). Perkembangan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 403–407.
- Bappenas. (2019). *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai Indikator Kualitas Pembangunan Nasional dan Daerah*.
- Calero, C., & Turner, L. W. (2020). Regional economic development and tourism: A literature review to highlight future directions for regional tourism research. *Tourism Economics*, 26(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/1354816619881244>
- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru : Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 41–53.
- Deliabilda, S. A., Marlisa, V., Anditya, F. S., Ariana, T., & Dasman, S. (2021). Penerapan Nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam Percepatan Ekonomi Inklusif di Era Society

5.0. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 1–20.

- Faradis, R., & Suwandana, E. (2023). Peran Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pulau Sumatera Pasca Pandemi Covid-19. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 6(2), 124–133.
- Fei, J., Lin, Y., Jiang, Q., Jiang, K., Li, P., & Ye, G. (2021). Spatiotemporal coupling coordination measurement on islands ' economy-environment-tourism system. *Ocean and Coastal Management*, 212(July), 105793. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105793>
- Harsono, I., Sutanto, H., Rois, I., Fadliyanti, L., & Mulawiani, B. S. W. (2024). Kontribusi Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Ganec Swara*, 18(1), 196–208.
- Haryani, T., Syafiq, M. I., Christina, O., & Candra, M. (2023). Kolaborasi Antara Pemerintah, Pengusaha, Dan Serikat Pekerja Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(2), 223–231.
- Hidayat, N. (2021). *Kerentanan Sosial Ekonomi dan Keberlanjutan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas*. IPB University.
- Hussain, S., Gul, R., & Ullah, S. (2023). Role of financial inclusion and ICT for sustainable economic development in developing countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 194, 122725.
- Ilma, A. F., & Supriadi, D. (2022). Blue Economy: Solusi Membangun Kembali Perekonomian “Blue Recovery” Pasca Pandemi Covid-19 untuk Sustainable Welfare. *Jurnal Lingkar Ekonomika*, 1(1), 87–96.
- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). *Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal*.
- Karjoko, L., Wahyu, D., Nur, Z., & Gusti, I. (2020). Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(8), 259–269.
- Le, A., Ruiz-palomo, D., Fern, M. A., & Raquel, M. (2021). Sustainable Tourism Development and Economic Growth : Bibliometric Review and Analysis. *Sustainability*, 13(4), 2270.
- Li, J., Chen, L., Chen, Y., & He, J. (2021). Digital economy , technological innovation , and green economic efficiency — Empirical evidence from 277 cities in China. *Managerial and Decision Economics*, 43(3), 1–14. <https://doi.org/10.1002/mde.3406>
- Lovina, R. (2023). Kajian Konsepsi Pengembangan Zona Ekonomi Maritim Di Wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal Potensi*, 3(2).
- Mangkurat, B. (2023). Mini Review: Kerangka Acuan Blue Economics Dalam Pemanfaatan Konservasi terumbu Karang Di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. *Science Technology and Management Journal*, 3(2), 75–78.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nesticò, A., & Maselli, G. (2019). Sustainability indicators for the economic evaluation of tourism investments on islands. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119217. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119217>
- Niaz, M. U. (2022). Socio-Economic development and sustainable development goals : a roadmap from vulnerability to sustainability through financial inclusion. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 35(1), 3243–3275.

- <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1989319>
- Nong, D., Wang, C., & Al-amin, A. Q. (2020). A critical review of energy resources , policies and scientific studies towards a cleaner and more sustainable economy in Vietnam. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 134, 110117. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110117>
- Novita, S., Devina, M. S., & Fretes, D. (2021). Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu. *Jurnal Abiwarra*, 2(2), 6–11.
- Nurjannah, I., & Mokodompit, E. A. (2023). *Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim*.
- Nusantara, S. D., Muhammad, F., Maryono, M., & Halim, M. A. R. (2023). TANTANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment*, 3(2), 216–225.
- Permana, M. (2018). Analisis pembangunan berkelanjutan di indonesia. *Prosiding SNMEB(Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis)*.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Oxford: Blackwell.
- Phelan, A. A., Ruhanen, L., Mair, J., Anya, A., Ruhanen, L., Mair, J., Phelan, A. A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community- based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Prasertiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., & Andirni, A. R. (2023). The Importance of Community Legal Awareness to Increase the Competitiveness of Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era in Semulang Village , Rempang District , Galang Island , Batam City. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19–25.
- Pratama, F., Dwie, I., Rizki, N., Andira, R., Sanjaya, R., & Putra, S. (2023). DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN KOTA TANJUNG PINANG Pendahuluan Metode. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 01(06), 1332–1336.
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia green growth program oleh BAPPENAS. *Jiep*, 20(1), 63–73.
- Sahdan, R., & Sardju, F. (2024). Financial Inclusion , Financial Literacy , and Financial Technology Impact on The Sustainability of Micro , Small , and Medium Enterprises : a Study in Tidore Islands , Indonesia. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 5(1), 497–509.
- Sari, S. N., & De Fretes, M. D. (2021). Pengembangan pariwisata dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat di Pulau Pari Kepulauan Seribu. *Jurnal Abiwarra*, 2(2), 6–12.
- Sinabutar, M. J., Ramadhani, T., & Ulum, M. (2024). Inisiasi Pasca Tambang Menuju Desa Wisata Perlang (Studi di Desa Perlang , Lubuk Besar , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 150–156. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4613>
- Su, C., Song, Y., & Umar, M. (2021). Financial aspects of marine economic growth : From the perspective of coastal provinces and regions in China. *Ocean and Coastal Management*, 204(October 2020), 105550. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.1>

05550

- Syafira, S. R. (2023). Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah: Solusi atau Tantangan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(02), 128–139.
- Talib, A. (2018). Peluang dan tantangan industri teknologi pengolahan hasil perikanan dalam mendukung terwujudnya lumbung ikan nasional (LIN) di Maluku Utara Agrikan. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 19–27.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia*.
- Tini, H., Ikhsan, M., Christina, O., & Candra, M. (2023). Kolaborasi Antara Pemerintah, Pengusaha, Dan Serikat Pekerja Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 01(02), 223–231.
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Concept Blue Economy Dan Green Economy Terhadap Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2875–2886.
- Wijijayanti, T., Agustina, Y., Winarno, A., & Istanti, L. N. (2020). Rural Tourism: A Local Economic Development. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1), 5–13.
- Wondirad, A., Kebete, Y., & Li, Y. (2021). Culinary tourism as a driver of regional economic development and socio-cultural revitalization: Evidence from Amhara National Regional. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100482. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100482>
- Wu, M., Wu, J., & Zang, C. (2020). A comprehensive evaluation of the eco-carrying capacity and green economy in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area , China. *Journal of Cleaner Production*, 281(xxxx), 124945. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124945>
- Yuni, A. (2022). *Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. UIN Ar-Raniry.